

TESIS

**PENGARUH *RED FLAGS* DAN INDEPENDENSI TERHADAP
KEMAMPUAN AUDITOR DALAM MENDETEKSI *FRAUD*
DENGAN *MORAL REASONING* SEBAGAI VARIABEL
MODERASI PADA AUDITOR INSPEKTORAT
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

***THE EFFECTS OF RED FLAGS AND INDEPENDENCE ON
THE AUDITOR'S ABILITY TO DETECT FRAUD WITH
MORAL REASONING AS THE MODERATING VARIABLE
ON THE AUDITORS OF INSPECTORATE
IN SOUTH SULAWESI PROVINCE***

DEWI MUSTIASANTI



**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

TESIS

**PENGARUH *RED FLAGS* DAN INDEPENDENSI TERHADAP
KEMAMPUAN AUDITOR DALAM MENDETEKSI *FRAUD*
DENGAN *MORAL REASONING* SEBAGAI VARIABEL
MODERASI PADA AUDITOR INSPEKTORAT
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

***THE EFFECTS OF RED FLAGS AND INDEPENDENCE ON
THE AUDITOR'S ABILITY TO DETECT FRAUD WITH
MORAL REASONING AS THE MODERATING VARIABLE
ON THE AUDITORS OF I INSPECTORATE
IN SOUTH SULAWESI PROVINCE***

sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister
disusun dan diajukan oleh

**DEWI MUSTIASANTI
A062181013**



kepada

**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

TESIS

PENGARUH *RED FLAGS* DAN INDEPENDENSI TERHADAP KEMAMPUAN AUDITOR DALAM MENDETEKSI *FRAUD* DENGAN *MORAL REASONING* SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA AUDITOR INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI SELATAN

disusun dan diajukan oleh

DEWI MUSTIASANTI
A062181013

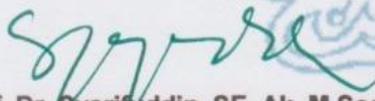
telah dipertahankan dalam sidang ujian tesis
pada tanggal 13 Agustus 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

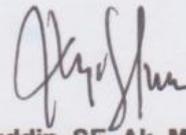
Komisi Penasihat

Ketua

Anggota

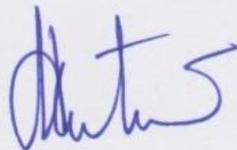


Prof. Dr. Syarifuddin, SE., Ak., M.Soc., Sc., CA.
NIP. 196302101990021001



Dr. Syamsuddin, SE., Ak., M.Si., CA.
NIP. 196704141994121001

Ketua Program Studi
Magister Sains Akuntansi



Dr. R. A. Damayanti, SE., Ak., M.Soc., Sc., CA.
NIP. 196703191992032003



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si.
NIP. 196402051988101001

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dewi Mustiasanti
NIM : A062181013
Jurusan/program studi : Magister Akuntansi

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul:

PENGARUH *RED FLAGS* DAN INDEPENDENSI TERHADAP KEMAMPUAN AUDITOR DALAM MENDETEKSI *FRAUD* DENGAN *MORAL REASONING* SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA AUDITOR INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI SELATAN

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 13 Agustus 2020
Yang membuat pernyataan,



Dewi Mustiasanti

PRAKATA

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah Rabbil'alamin, segala puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas berkah rahmat, kesehatan dan karunia-Nya sehingga peneliti diberi kesempatan untuk menyelesaikan tugas akhir tesis ini. Tak lupa pula shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW sebagai penyempurna dan pembawa risalah untuk kita semua. Tesis ini peneliti susun untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik guna menyelesaikan program studi Magister Akuntansi pada Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar. Adapun judul tesis yang peneliti susun berjudul "Pengaruh *Red Flags* dan Independensi Terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi *Fraud* dengan *Moral Reasoning* sebagai Variabel Moderasi pada Auditor Inspektorat Provinsi Sulawesi".

Penyusunan tesis ini tidak lepas dari bimbingan, arahan, masukan, kerja sama dan motivasi berbagai pihak yang turut membantu selama penyelesaian tesis ini. Untuk itu, peneliti menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada orang tua tercinta ayahanda Dr. H. Musrifu H., M.Hi. dan ibunda Hj. Nur Heti, S.St. atas segala doa, arahan, dan kasih sayangnya yang diberikan kepada peneliti selama proses penyusunan tesis ini, serta kakak peneliti Irfan Nur Hadi, S.H., M.H. yang selalu memberikan semangat kepada peneliti.

Tidak lupa juga peneliti mengucapkan terimakasih kepada bapak Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si. selaku dekan fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Hasanuddin. Ibu Dr. Ratna Ayu Damayanti, S.E., Ak., M.Soc.Sc., CA.

selaku ketua program studi magister akuntansi fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Hasanuddin atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan kepada peneliti selama menempuh studi hingga dapat menyelesaikan tesis ini.

Peneliti juga ucapkan terimakasih kepada bapak Prof. Dr. Syarifuddin, S.E., Ak., M.Soc., Sc., CA. selaku pembimbing I dan bapak Dr. Syamsuddin, S.E., Ak., M.Si., CA. selaku pembimbing II atas bimbingan, masukan, arahan dan motivasinya kepada peneliti. Serta kepada para penguji bapak Prof. Dr. Gagaring Pagalung, S.E., Ak., MS., CA., ibu Prof Dr. Hj. Kartini, S.E., Ak., M.Si., CA. dan ibu Dr. Aini Indrijawati S.E., Ak., M.Si., CA. yang telah memberikan saran dan nasehat dalam penyusunan tesis ini.

Seluruh dosen dan staf pascasarjana fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Hasanuddin yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan, didikan, bimbingan dan bantuannya kepada peneliti selama perkuliahan sampai dengan penyelesaian tesis ini. Kepada pimpinan, auditor, beserta staf pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah memberikan izin dan kemudahan kepada peneliti selama melakukan penelitian. Kepada teman-teman pada program magister akuntansi angkatan 2018 Fitri Rahmawati S.E., Salsabila S.E., Maryam S.E., Desi Ratna D. S.Pd., Dwi Utami S.Pd., Yulianti Karomah S.E., Febrina Siswi S.E., Melati Arsyad S.E., Farlina S.E., Achmad Fadlan S.E., Abd. Arsyad S.E., CA., Aditya Bahar P. S.E., Imanuddin S.E. dan Eko Edy Susanto S.E. atas kebersamaan, dukungan dan bantuannya selama perkuliahan sampai dengan penyelesaian tesis ini.

Kepada Prabowo Nugroho K. S.AB., yang sudah memberikan dukungan kepada peneliti dan yang terakhir kepada seluruh pihak yang tidak disebutkan namanya di atas, yang telah membantu peneliti dalam penyusunan dan penyelesaian tesis ini. Semoga segala kebaikan kalian diterima sebagai amal

ibadah disisi-Nya. Peneliti berharap tesis ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya. Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan dikarenakan kemampuan peneliti yang masih kurang. Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati peneliti meminta maaf dan mengharapkan kritik serta saran guna perbaikan di masa yang akan datang. Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan petunjuk dan meridhoi kita semua. Aamiin.

Makassar, 13 Agustus 2020
Peneliti,

Dewi Mustiasanti

ABSTRAK

DEWI MUSTIASANTI. Pengaruh *Red Flags* dan Independensi Terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi *Fraud* dengan *Moral Reasoning* sebagai Variabel Moderasi pada Auditor Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan (dibimbing oleh **Syarifuddin** dan **Syamsuddin**).

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan ulasan pengaruh *red flags* dan independensi terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud* dengan *moral reasoning* sebagai variabel moderasi.

Objek penelitian adalah auditor Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. Populasi sebanyak 51 auditor. Penentuan sampel memakai Teknik *Nonprobability sampling*, yaitu penelitian yang pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Jumlah populasi dalam penelitian ini 51 auditor dan semua populasi dijadikan sampel. Pengambilan data menggunakan kuesioner dengan analisis data menggunakan *moderated regression analysis (MRA)* dengan menggunakan bantuan SPSS versi 25.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) *red flags* berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*; (2) independensi berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*; (3) *moral reasoning* berpengaruh positif dalam memoderasi dengan arah memperkuat hubungan *red flags* terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*; dan (4) *moral reasoning* berpengaruh positif dalam memoderasi dengan arah memperkuat hubungan independensi terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*.

Kata kunci : *red flags*, independensi, *moral reasoning*, kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*.

ABSTRACT

DEWI MUSTIASANTI. *The effects of red flags and independence on the auditor's ability to detect fraud with moral reasoning as the moderating variable on the auditors of inspectorate in south sulawesi province. (Supervised by **Syarifuddin** and **Syamsuddin**).*

This study aims to provide an overview of the effects of red flags and independence on the auditor's ability to detect fraud with moral reasoning as the moderating variable.

The object of research was the auditors of Inspectorate in the South Sulawesi Province. Population are 51 auditors. Determination of the sample used the Nonprobability sampling technique, that was research that took samples that did not provide equal opportunities / opportunities for each element or member of the population to be selected as samples. The population in this study was 51 auditors and all populations were used as samples. Data were collected through a questionnaire with data analysis by moderating regression analysis (MRA) using SPSS version 25.

The results showed that (1) red flags have a positive effect on the ability of auditors to detect fraud; (2) independence has a positive effect on the ability of auditors to detect fraud; (3) moral reasoning has a positive effect on moderation by strengthening the relationship between red flags and the ability of auditors to detect fraud; and (4) moral reasoning has a positive effect on moderation by strengthening the relationship between independence and the ability of auditors to detect fraud.

Keywords: red flags, independence, moral reasoning, auditor's ability to detect fraud.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Kegunaan Penelitian	9
1.4.1 Kegunaan Teoritis.....	9
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	9
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep	12
2.1.1 Teori Atribusi	12
2.1.2 <i>Cognitive Development Theory</i>	13
2.1.3 Kecurangan (<i>fraud</i>)	14
2.1.4 <i>Fraud Pentagon Theory</i>	16
2.1.5 <i>Red Flags</i>	18
2.1.6 Independensi Auditor	23
2.1.7 <i>Moral Reasoning</i>	29
2.1.8 Kemampuan Auditor Mendeteksi <i>Fraud</i>	33
2.2 Tinjauan Empiris	35
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	36
3.1 Kerangka Konseptual	36
3.2 Hipotesis	38
BAB IV METODE PENELITIAN	44

4.1 Rancangan Penelitian	44
4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	45
4.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel	45
4.4 Jenis dan Sumber Data	46
4.5 Metode Pengumpulan Data	47
4.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	48
4.7 Instrumen Penelitian	52
4.8 Teknik Analisis Data	53
4.8.1. Uji Kualitas Data	54
4.8.1.1. Uji Validitas	54
4.8.1.2. Uji Reliabilitas	55
4.8.2. Uji Asumsi Klasik	55
4.8.2.1. Uji Normalitas	56
4.8.2.2. Uji Multikolinearitas	56
4.8.2.3. Uji Heteroskedastisitas	57
4.8.3. Uji Hipotesis	57
4.8.3.1. <i>Multiple Regression Analysis</i> (uji-t)	58
4.8.3.2. <i>Moderated Regression Analysis</i>	59
BAB V HASIL PENELITIAN	60
5.1 Deskripsi Data	60
5.1.1 Gambaran Umum Responden	60
5.1.2 Analisis Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	62
5.2 Deskripsi Variabel Penelitian	67
5.2.1 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian	67
5.3 Pengujian Asumsi Klasik	70
5.3.1 Uji Normalitas	70
5.3.2 Uji Multikolinearitas	71
5.3.3 Uji Heteroskedastisitas	72
5.4 Analisis Regresi Data Penelitian	73
5.4.1 <i>Multiple Regression Analysis</i> (uji-t)	73
5.4.2 <i>Moderated Regression Analysis</i>	75
5.5 Pengujian Hipotesis	78
BAB VI PEMBAHASAN	82
6.1 <i>Red flags</i> berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi <i>fraud</i>	82
6.2 Independensi berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi <i>fraud</i>	84
6.3 <i>Moral reasoning</i> berpengaruh positif dalam memoderasi hubungan antara <i>red flags</i> terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi <i>fraud</i>	86

6.4 <i>Moral reasoning</i> berpengaruh positif dalam memoderasi hubungan antara independensi terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi <i>fraud</i>	87
BAB VII PENUTUP	90
7.1 Kesimpulan	90
7.2 Implikasi	91
7.3 Keterbatasan Penelitian	92
7.4 Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	99

DAFTAR TABEL

	Halaman
5.1 Tabel Tingkat Pengembalian Kuesioner	60
5.2 Tabel Karakteristik Responden Penelitian	61
5.3 Tabel Statistik Deskriptif	62
5.4 Tabel Deskripsi <i>Red Flags</i>	64
5.5 Tabel Deskripsi Independensi	65
5.6 Tabel Deskripsi <i>Moral Reasoning</i>	66
5.7 Tabel Deskripsi Kemampuan Auditor dalam <i>Fraud</i>	67
5.8 Tabel Rekapitulasi Pengujian Validitas	68
5.9 Tabel Rekapitulasi pengujian Reliabilitas	70
5.10 Tabel Hasil Pengujian Asumsi Multikolonieritas	72
5.11 Tabel Hasil Uji <i>Multiple Regression</i>	74
5.12 Tabel Hasil Uji <i>Moderated Regression</i>	76
5.13 Tabel Hasil Uji <i>Moderated Regression</i>	77
6.1 Tabel Ringkasan Hasil Penelitian	82

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
3.1 Gambar Kerangka Konseptual	37
5.1 Gambar Hasil Uji Normalitas	71
5.2 Gambar Hasil Uji Heteroskedastisitas	73

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perekonomian dan teknologi saat ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi kemajuan suatu negara namun dapat juga menjadi batu sandungan karena adanya *fraud* yang dilakukan oleh pihak yang ingin mendapatkan keuntungan secara instan. *Fraud* meningkat dengan pesat di kalangan perusahaan, organisasi, bahkan instansi pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa *fraud* harus segera ditangani, oleh karena itu setiap perusahaan ataupun instansi pemerintah memerlukan auditor untuk memeriksa laporan keuangan (Hartan dan Indarto, 2016).

Fraud dan kekeliruan (*error*) berbeda, yang membedakannya adalah tindakan yang mendasarinya, apakah tindakan tersebut dilakukan secara disengaja atau tidak. Apabila tindakan tersebut dilakukan secara sengaja, maka itu disebut kecurangan atau *fraud* dan apabila tindakan tersebut dilakukan secara tidak sengaja, maka itu disebut dengan kekeliruan atau *error* (Hutabarat, 2015).

Fraud merupakan bahaya laten yang mengancam keberlangsungan organisasi. Hasil penelitian dari *Assosiation of Certified Fraud Exeminers (ACFE)* menunjukkan bahwa setiap tahun rata-rata 5% dari pendapatan organisasi menjadi korban *fraud*. Kasus-kasus *fraud* terjadi di semua jenis organisasi baik pemerintahan, perusahaan maupun organisasi profit. Pada tahun 2003, ACFE juga mengemukakan *fraud* yang terbesar adalah *financial reporting fraud*. Di Indonesia banyak terjadi *fraud* seperti *financial fraud* (korupsi). Hasil pemantauan ICW (*Indonesia Corruption Watch*) pada tahun 2015 menunjukkan

bahwa kerugian negara akibat korupsi sebesar Rp 3,1 Triliun. Kerugian negara pada tahun 2015 disebabkan oleh banyaknya perkara korupsi yang tercatat oleh ICW sebanyak 550 perkara (Fitriana, 2019).

Pelaku tindak *fraud* juga berkembang bukan hanya terbatas pada golongan atas tetapi sudah menyentuh pada lapisan pegawai bawah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa diperlukan kepedulian dan kewaspadaan semua pihak terkait dengan terjadinya tindak *fraud*. Penyalahgunaan aset, manipulasi pajak serta laporan keuangan, dan penyuapan merupakan bukti-bukti terjadinya *fraud* baik yang dilakukan individu maupun lembaga pemerintahan yang dapat merugikan negara (Hartan dan Indarto, 2016).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 menyebutkan bahwa pemerintah daerah diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban telah berakhirnya tahun anggaran, yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Standar Akuntansi Pemerintah menjadi pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor. Dengan adanya SAP maka laporan keuangan pemerintah pusat atau daerah akan lebih berkualitas, dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat dipercaya. Salah satu pengguna Standar Akuntansi Pemerintah ialah auditor pemerintah. Auditor pemerintah adalah auditor yang bekerja di instansi pemerintahan yang bertugas untuk melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan unit-unit organisasi atau entitas pemerintahan atau pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah (Dandi, 2017).

Penelitian ini merujuk pada penelitian pengaruh pengalaman, independensi, skeptisisme profesional auditor, penerapan etika, dan beban kerja terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (Larasati dan Windy, 2019) dan penelitian pengaruh pengalaman audit, skeptisisme profesional, *red flags*, dan tekanan anggaran waktu terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (Arsendy, 2017). Penelitian tersebut dilakukan di kantor akuntan publik. Karena sudah banyaknya penelitian mengenai kemampuan auditor mendeteksi kecurangan dilakukan di KAP, maka peneliti memilih Inspektorat untuk membandingkan hasil yang akan didapatkan. Dimana KAP sebagai auditor eksternal atau independen dan Inspektorat sebagai auditor internal.

Adapun penelitian lainnya mengenai variabel *red flags* yang dilakukan di perusahaan profit yaitu penelitian mengenai pengaruh *red flags* dan *whistleblowing system* terhadap pendeteksian penyalahgunaan aset yang dilakukan di PT. Kimia Farma Tbk (Badzlina W., et al., 2018). Sementara peneliti memilih variabel *moral reasoning* sebagai variabel moderasi di dasarkan pada penelitian dengan judul *moral reasoning* memoderasi kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit, yang menunjukkan hasil bahwa *moral reasoning* berpengaruh dalam memoderasi variabel independensi terhadap kualitas audit (Mindarti et al., 2016), sehingga peneliti ingin mengetahui apakah *moral reasoning* dapat memoderasi independensi terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*. Tetapi menurut *research* peneliti, peneliti belum menemukan penelitian mengenai *moral reasoning* memoderasi *red flags* terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*. Sehingga hal tersebut juga menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh *red*

flags terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud* yang di moderasi oleh *moral reasoning*.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 dalam melakukan fungsi sistem pengendalian internal di Indonesia antara lain Badan Pengawasan Keuangan Pemerintah (BPKP), Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Inspektorat merupakan suatu unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan. Inspektorat mempunyai tugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah atau provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota dan audit/pemeriksaan terhadap pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Inspektorat merupakan suatu aparat pemeriksa intern pemerintah dan pembangunan, tugasnya melakukan pengawasan terhadap urusan pemerintah. Inspektorat memiliki peran yang cukup signifikan sebagai pemeriksa internal yang biasa disebut auditor internal dalam mendeteksi kecurangan dan meningkatkan laporan keuangan daerah.

Pada buku *Modern Auditing* fungsi auditor internal adalah melaksanakan fungsi pemeriksaan internal yang merupakan suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan. Selain itu, auditor internal diharapkan dapat lebih memberikan sumbangan bagi perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam rangka peningkatan kinerja organisasi dalam hal ini organisasi pemerintahan. Dengan demikian auditor internal pemerintah memegang peranan yang sangat penting

dalam proses terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan lingkup pemerintahannya (Boynton *et al*, 2007).

Meski entitas sektor publik tidak bertujuan untuk mendapatkan laba seperti entitas privat, namun pelaporan keuangan sektor publik harus terbatas dari *fraud* mengingat pengguna laporan yang terdiri dari berbagai elemen, mulai dari masyarakat umum, para pembayar pajak, lembaga eksekutif, lembaga legislatif, pejabat entitas sektor publik, pihak ketiga/penyedia barang dan jasa, media, industri kelompok tertentu dan penerima manfaat lainnya. Oleh karena itu manajemen keuangan harus efektif dan efisien dalam mengelola keuangan dan melaporkan penggunaannya (*Australian National Audit Office, 2015*).

Di Indonesia, *fraud* pada instansi pemerintah tidak hanya melibatkan orang-orang yang mempunyai jabatan tinggi tetapi juga orang-orang yang berada dibawahnya, serta tidak hanya terjadi di lingkungan pemerintah pusat melainkan juga lingkungan pemerintah daerah. *Fraud* yang seringkali dilakukan di antaranya adalah memanipulasi pencatatan laporan keuangan, penghilangan dokumen, dan *mark-up* laba yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Kecurangan ini biasanya dipicu oleh adanya kesempatan untuk melakukan penyelewengan. Tindakan tersebut dilakukan semata-mata untuk kepentingan pribadi dan sekelompok orang agar *fraud* dapat diminimalisir tentu saja perusahaan ataupun instansi pemerintah perlu cara yang efektif dan efisien untuk meningkatkan pengendalian internal.

Auditor internal merupakan bagian dari pengendalian internal yang berfungsi untuk membantu dalam mencegah dan mendeteksi *fraud* yang mungkin dapat terjadi. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) tahun 2017 mengemukakan bahwa pemeriksa harus mengidentifikasi faktor risiko

fraud dan menilai risiko adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang disebabkan oleh *fraud* dan/atau ketidakpatuhan.

Memberantas *fraud* diperlukan kemampuan seorang auditor dalam mendeteksi *fraud*. Salah satunya ialah dengan mengenal munculnya tanda-tanda *fraud* yang dikenal dengan *red flags*. *Red flags* merupakan sinyal-sinyal *fraud* yang tercermin melalui karakteristik tertentu yang bersifat kondisi atau situasi yang merupakan peringatan dini terjadinya *fraud*. *Red flags* juga merupakan tanda-tanda awal terjadinya *fraud* (Karyono, 2013). Penelitian mengenai pengaruh *red flags*, skeptisme profesional auditor, kompetensi, independensi dan profesionalisme terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud* menyimpulkan bahwa *red flags* berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud* (Prasetyo, 2015). Adapun dalam proses *auditing*, auditor biasa menemukan kejanggalan-kejanggalan atau hal-hal yang tidak sesuai standar dan tidak sesuai dengan fakta. Hal tersebut bisa jadi adanya indikasi kecurangan atau *fraud*.

Atas penemuan tersebut auditor harus memiliki *moral reasoning* untuk mempertimbangkan keputusan apa yang akan diambil setelah menemukan penemuan tersebut. *Moral reasoning* adalah alasan yang mendasari seseorang dalam melakukan suatu tindakan atau alasan yang mendasari seseorang dalam membenarkan ataupun mengkritik suatu perbuatan (Gaffikin dan Lindawati, 2012). Seorang auditor yang memiliki *moral reasoning* yang tinggi, akan lebih tepat dalam mengambil keputusan dalam *red flags* yang ditemukan, sehingga meminimalisirkan adanya tindak kecurangan. Dalam hal ini alasan moral diperoleh dari proses pembelajaran dan penalaran ilmiah yang dilakukan seseorang (auditor). Bentuk-bentuk alasan moral terlihat dari perilaku yang

diperlihatkan didalam bekerja seperti jujur dan bekerja sesuai dengan hati nurani dan sumpah jabatan. Ketika pertimbangan moral telah dilaksanakan dengan baik dalam membuat setiap keputusan, maka mutu pekerjaan yang dilaksanakan akan semakin membaik. Hal ini dibuktikan dengan penelitian mengenai pengaruh *moral reasoning*, skeptisme profesional dan kecerdasan spiritual terhadap kualitas audit dengan pengalaman kerja auditor sebagai variabel moderasi yang menyimpulkan bahwa *moral reasoning* memiliki pengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud* (Syarhayuti dan Faidul, 2016).

Selain itu juga auditor harus memiliki independensi dalam mengelola dan memutuskan langkah apa yang harus diambil selanjutnya dalam penemuan *red flags* tersebut tanpa adanya pengaruh-pengaruh negatif dari pihak lain yang dapat merusak independensi auditor tersebut. Independensi merupakan salah satu sikap yang harus dimiliki setiap auditor, dalam menjalankan tugasnya. Tanpa adanya independensi, maka auditor tidak berarti apa-apa. Independensi merupakan bentuk jaminan dari auditor tentang objektivitas hasil pekerjaan yang dilakukannya.

Seorang auditor yang independen akan melakukan pemeriksaan secara objektif, auditor harus mempertimbangkan benar dan salahnya dalam tindakan yang akan diambil, hal itu dapat dilihat dari tingkat perkembangan perilaku *moral reasoning* auditor. Ketika auditor memiliki *moral reasoning* yang baik, maka akan bertindak sesuai dengan kode etik yang berlaku. Sehingga audit yang dijalankan dapat diungkapkan sesuai dengan fakta yang terjadi tanpa adanya sesuatu yang ditutup-tutupi. Sehingga akan meningkatkan kualitas audit yang dilakukannya yang otomatis dapat meningkatkan kemampuannya dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*). Hal ini sejalan dengan penelitian mengenai pengaruh

pengalaman, independensi, skeptisisme profesional auditor, penerapan etika, dan beban kerja terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan yang menyimpulkan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (Larasati dan Windhy, 2019). Dari penjelasan diatas peneliti memilih judul “Pengaruh *Red Flags* dan Independensi Terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi *Fraud* dengan *Moral Reasoning* sebagai Variabel Moderasi pada Auditor Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, dan merujuk pada penelitian sebelumnya, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah *red flags* berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*?
2. Apakah independensi auditor berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*?
3. Apakah *moral reasoning* memoderasi pengaruh *red flags* terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*?
4. Apakah *moral reasoning* memoderasi pengaruh independensi auditor terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui apakah *red flags* berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*.

2. Mengetahui apakah independensi auditor berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*.
3. Mengetahui apakah *moral reasoning* memoderasi pengaruh *red flags* terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*.
4. Mengetahui apakah *moral reasoning* memoderasi pengaruh independensi auditor terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*.

1.4 Kegunaan Penelitian

Bagian kegunaan penelitian akan menunjukkan kegunaan dan pentingnya penelitian, terutama bagi pengembangan ilmu atau pelaksanaan pembangunan dalam arti luas.

1.4.1 Kegunaan Teoretis

1. Sebagai media informasi untuk memperluas wawasan mengenai pendeteksian *fraud*, terutama pendeteksian *fraud* pada sektor pemerintahan.
2. Sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai topik ini.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya sebagai berikut.

1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Bermanfaat untuk pengembangan ilmu di Program Pascasarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

2. Instansi yang diteliti.

Bagi instansi terkait diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat sebagai bahan acuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud* pada sektor pemerintahan.

3. Peneliti dan mahasiswa.

Sebagai referensi untuk penelitian dimasa yang akan datang untuk pengujian topik-topik yang lebih mendalam lagi berkaitan dengan masalah ini.

4. Bagi masyarakat umum.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada akuntan sektor publik dalam melaksanakan audit terutama dalam pendektasian *fraud* agar terciptanya transparansi.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam tesis ini terdiri dari tujuh bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, kerangka konseptual dan hipotesis, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan dan penutup dengan uraian sebagai berikut.

Bab I merupakan pendahuluan. Bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II merupakan tinjauan pustaka. Bab ini menguraikan tinjauan teori dan konsep, dan tinjauan empiris.

Bab III merupakan kerangka konseptual dan hipotesis. Bab ini menguraikan kerangka konseptual dan hipotesis.

Bab IV merupakan metode penelitian. Bab ini terdiri dari rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, instrumen penelitian, dan teknik analisis data.

Bab V merupakan hasil penelitian. Bab ini berisi tentang deskripsi data, deskripsi variabel penelitian, pengujian asumsi klasik, hasil regresi data penelitian dan pengujian hipotesis.

Bab VI merupakan pembahasan. Bab ini menguraikan tentang pembahasan mengenai hasil penelitian.

Bab VII merupakan penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan, implikasi, keterbatasan penelitian dan saran yang nantinya dapat dijadikan acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Teori Atribusi

Teori atribusi akan memberikan penjelasan mengenai bagaimana cara menentukan penyebab atau motif perilaku seseorang. (Heider, 1958) sebagai pencetus teori atribusi mengemukakan bahwa teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori atribusi menjelaskan mengenai proses bagaimana kita menentukan penyebab dan motif tentang perilaku seseorang. Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal misalnya sifat, karakter, sikap ataupun eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu (Luthans, 2005).

(Robbins, 2003:177) juga mengemukakan bahwa teori atribusi adalah perilaku seseorang yang disebabkan oleh faktor internal atau faktor eksternal. Faktor internal adalah pemicu yang berada di bawah kendali pribadi individu itu, sementara faktor eksternal dilihat sebagai hasil dari sebab-sebab luar, yaitu individu dipandang terpaksa berperilaku demikian karena situasi. Sementara (Ikhsan dan Ishak, 2008:55) menjelaskan bahwa teori atribusi mempelajari tentang bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa, alasan, atau sebab perilakunya. Apakah perilaku itu disebabkan oleh faktor disposisional (faktor dalam/internal), atautkah disebabkan oleh keadaan eksternal. (Andhani dan Mertha, 2014) juga mengemukakan teori

atribusi yaitu teori yang menjelaskan mengenai perilaku seseorang. Teori ini menjelaskan tentang proses bagaimana kita atau seseorang dapat menentukan apa motif dan penyebab mengenai perilaku seseorang. Sehingga dalam penelitian ini, teori atribusi dapat dihubungkan dengan independensi auditor yang dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal dalam kemampuannya dalam mendeteksi *fraud*.

2.1.2 Teori Perkembangan Moral (*Cognitive Development Theory*)

Teori perkembangan moral (*Cognitive Development Theory* atau *CDT*) pertama kali dikemukakan oleh (Kohlberg, 1969), yang memfokuskan pada perkembangan kognitif dari struktur penalaran (*reasoning*) yang mendorong atau menyebabkan seseorang membuat keputusan. Kohlberg mengembangkan teorinya dengan menggunakan teori kognitif dari Piaget seorang ahli psikologi Swiss. Menurut Kohlberg tahapan perkembangan moral merupakan ukuran dari tinggi rendahnya moral seseorang berdasarkan perkembangan penalaran moralnya. Adapaun tiga tahapan yang diklasifikasikan oleh Kohlberg, yaitu tahapan *pre-conventional*, tahapan *conventional* dan tahapan *post-conventional*.

Pada tahapan yang pertama yaitu *pre-conventional*, tahapan ini ialah tahapan yang paling rendah. Individu akan cenderung bertindak karena tunduk dan takut pada hukum yang ada. Selain itu individu pada level moral ini juga memandang kepentingan pribadinya sebagai hal utama dalam melakukan suatu tindakan.

Sementara itu tahapan kedua yaitu *conventional*, dimana individu memiliki dasar pertimbangan moral yang berkaitan dengan pemahaman hukum, aturan sosial di masyarakat, kewajiban, dan keadilan dalam

lingkungan sosialnya. Individu pada tahap ini mulai membentuk *moral reasoning* dalam dirinya dengan menaati peraturan seperti aturan etika, kode etik profesi untuk menghindari perilaku disfungsional.

Tahapan yang terakhir ialah *post-conventional*, dimana individu telah menunjukkan kematangan moral yang lebih tinggi. Kematangan moral merupakan dasar pertimbangan individu saat menyikapi isu-isu etis terkait pertanggungjawaban sosial pada orang lain. Berdasarkan tanggungjawab sosial, individu/auditor yang mempunyai moral *reasoning* tinggi diharapkan tidak akan melakukan perilaku yang menyimpang dalam tugas auditnya.

2.1.3 Kecurangan (*Fraud*)

Fraud menurut istilah yang secara umum diartikan sebagai kecurangan atau penipuan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan secara material dan non material. (SKPN No. 1 Tahun 2017) mendefinisikan *fraud* adalah perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, niat, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, penipuan, penyembunyian atau penggelapan, dan penyalahgunaan kepercayaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah yang dapat berupa uang, barang/harta, jasa, dan tidak membayar jasa, yang dilakukan oleh satu individu atau lebih dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, pegawai, atau pihak ketiga. Menurut (Tuanakotta, 2013) kemampuan auditor dalam pendeteksian *fraud* berkaitan dengan teknik-teknik yang dikuasai auditor sebagai bekal dalam menjalankan tugasnya. Teknik yang dimaksud dapat berupa teknik dalam mengaudit laporan keuangan, kemampuan audit investigatif untuk kejahatan terorganisir dan penyelundupan pajak

penghasilan, dan kemampuan audit investigatif dalam pengungkapan *fraud* pengadaan barang dan jasa.

Menurut *The Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), *fraud* adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain) dilakukan orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain. *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) mengklasifikasikan *fraud* dalam tiga jenis yaitu penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*), korupsi (*corruption*), dan *fraud* atas pernyataan (*Fraudulent statements*).

a. *Asset Misappropriation*.

Asset misappropriation meliputi penyalahgunaan/pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain. Ini merupakan bentuk *fraud* yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang *tangible* atau dapat diukur/dihitung (*defined value*).

b. *Corruption*.

Korupsi merupakan bentuk *fraud* yang banyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. *Fraud* jenis ini sering kali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan (*simbiosis mutualisme*).

c. *Fraudulent Statements.*

Fraudulent statements atau *fraud* pelaporan meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan.

2.1.4 Fraud Pentagon Theory

Fraud pentagon theory adalah teori yang dikemukakan oleh (Crowe, 2011). Teori ini ialah pengembangan dari teori *Fraud Triangle* (Donald R. Cressey, 1953) dan teori *Fraud Diamond* (Wolfe dan Hermanson, 2004). Dimana teori sebelumnya *fraud triangle theory* memiliki tiga komponen, yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan/peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rasionalizazion*). Kemudian pada *fraud diamond theory* ditambahkan satu komponen yaitu kompetensi (*capability/competence*), sehingga teori *fraud diamond* menjadi empat komponen. Selanjutnya pada *fraud pentagon theory* ini disempurnakan lagi oleh (Crowe, 2011) dengan menambahkan satu komponen baru lagi yaitu arogansi (*arrogance*). Sehingga *fraud pentagon theory* ini menjadi lima komponen, yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan/peluang (*opportunity*), rasionalisasi (*rasionalizazion*), kompetensi (*capability/competence*) dan arogansi (*arrogance*).

a. Tekanan (*pressure*).

Tekanan atau *pressure* merupakan dorongan bagi seseorang untuk melakukan *fraud*. Tekanan dapat muncul dari diri pelaku itu sendiri seperti adanya tekanan berupa faktor ekonomi dari keluarga, tekanan untuk gaya hidup mewah.

b. Kesempatan (*opportunity*).

Kesempatan atau *opportunity* adalah suatu keadaan dimana seseorang dapat melakukan *fraud*. Kesempatan ini terjadi karena lemahnya pengendalian internal suatu organisasi atau entitas, pengawasan manajemen yang tidak efektif, atau penyalahgunaan wewenang.

c. Rasionalisasi (*rationalization*).

Rasionalisasi ialah dimana pelaku *fraud* melakukan pembenaran dengan apa yang dilakukannya. Para pelaku kecurangan biasanya akan mencari berbagai alasan yang rasional untuk mengidentifikasi tindakan mereka. Rasionalisasi diperlukan untuk mencerna perilakunya yang melawan hukum untuk tetap mempertahankan jati dirinya agar tetap dipercaya sehingga kecurangannya tidak terdeteksi.

d. Kompetensi (*capability/competence*).

Kompetensi merupakan kemampuan karyawan/pegawai untuk menembus pengendalian internal yang ada di perusahaan atau entitasnya dalam mengembangkan strategi penggelapan yang canggih, dan mampu mengendalikan situasi sosial untuk mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri bahkan mempengaruhi orang lain agar bekerja sama dengan dirinya untuk mendapatkan keuntungan bersama.

e. Arogansi (*arrogance*).

Arogansi (*arrogance*) merupakan sifat kurangnya hati nurani yang merupakan sikap superioritas atau adanya sifat congkak pada seseorang. Kesombongan ini muncul dari keyakinan bahwa dirinya mampu melakukan kecurangan dan kontrol yang ada tidak dapat menimpa dirinya sehingga pelaku *fraud* biasanya berpikir bebas untuk

melakukan *fraud* tanpa takut adanya sanksi yang akan menjeratnya (Achsini dan Ruri, 2015). Pelakunya kebanyakan berada pada *top management* atau dalam instansi pemerintahan biasanya dilakukan oleh para pejabat yang memiliki wewenang, yang merasa pengendalian internal dan kebijakan instansi tidak berlaku untuk dirinya.

2.1.5 Red Flags

Istilah *red flags* atau bendera merah ialah tanda bahwa ada hal yang tidak sesuai pada tempatnya dan perlu mendapat perhatian. Auditor dan investigator menggunakan tanda bahaya (*red flags*) sebagai petunjuk atau indikasi terjadinya *fraud* pada sebuah laporan keuangan. Di Napoli (2012) mendefinisikan bahwa *red flags* adalah sebagai berikut:

“A red flag is a set of circumstances that are unusual in nature or vary from the normal activity. It is a signal that something is out of the ordinary and may need to be investigated further. Remember that red flags do not indicate guilt or innocence but merely provide possible warning signs of fraud”.

Dapat diartikan bahwa *red flags* adalah suatu kondisi yang janggal atau berbeda dengan keadaan normal. Dengan kata lain, *red flags* adalah petunjuk atau indikasi adanya sesuatu yang tidak biasa dan memerlukan penyidikan lebih lanjut. *Red flags* tidak mutlak menunjukkan apakah seseorang bersalah atau tidak tetapi merupakan tanda-tanda peringatan bahwa *fraud* sedang atau telah terjadi.

(Zimbelman *et al.*, 2014) mengistilahkan *red flags* sebagai tanda-tanda *fraud*. Menurutnya untuk mendeteksi *fraud* auditor harus menyadari adanya tanda-tanda *fraud* (*red flags*) dan menginvestigasi apakah tanda tersebut disebabkan oleh *fraud* yang benar-benar terjadi atau disebabkan oleh faktor lainnya. (Zimbelman *et al.*, 2014) juga membagi indikator-indikator *fraud*

menjadi enam kelompok yaitu anomali akuntansi, kelemahan pengendalian internal, anomali analitis, gaya hidup yang berlebihan, perilaku yang tidak wajar, dan informasi dan pengaduan.

Indikator anomali akuntansi umumnya terjadi melibatkan permasalahan dengan dokumen sumber, entri jurnal yang salah, dan ketidakakuratan dalam buku besar. *Fraud* terjadi ketika terdapat kombinasi antara tekanan yang dirasakan, peluang/kesempatan yang dimiliki, dan rasionalisasi. Ketika individu-individu di dalam organisasi banyak yang mengalami adanya tekanan dan semuanya berasionalisasi, kemudian disaat yang sama organisasi mengesampingkan pengendalian internal maka risiko *fraud* menjadi semakin besar.

Indikator anomali analitis adalah prosedur atau hubungan yang sangat tidak wajar atau sangat tidak realistis. Anomali analitis meliputi transaksi atau kejadian yang terjadi pada waktu dan tempat yang tidak biasa, yang dilakukan oleh atau melibatkan orang yang biasanya atau seharusnya tidak ikut terlibat, atau yang menggunakan prosedur, kebijakan, atau praktik yang tidak biasa.

Sebagian besar orang yang melakukan *fraud* mengalami tekanan keuangan. Terkadang tekanan keuangan tersebut nyata, dan terkadang tekanan tersebut hanya merupakan keserakahan. Setelah pelaku *fraud* memenuhi kebutuhan keuangannya, mereka biasanya terus melakukan pencurian dan menggunakan dana tersebut untuk meningkatkan gaya hidup mereka. Setelah itu, mereka memiliki gaya hidup yang lebih tinggi dari kemampuan mereka sebenarnya. Penelitian dalam psikologi mengungkapkan bahwa ketika seseorang yang baru pertama kali melakukan *fraud*, ia akan

diliputi oleh emosi ketakutan dan perasaan bersalah. Emosi tersebut merupakan ekspresi adanya suatu tekanan. Untuk mengatasi tekanan yang dirasakan, pelaku *fraud* sering menunjukkan pola perilaku yang tidak biasa dan dapat dikenali. Walaupun tidak ada perilaku khusus yang dapat menunjukkan adanya kecurangan, namun perubahan perilaku merupakan indikasi terjadinya *fraud*.

Tindakan *fraud* sulit dideteksi oleh auditor, karena setiap pelaku *fraud* pasti akan selalu menyembunyikan bukti atau jejak tindakan *fraudnya*. Oleh karena itu, informasi dan pengaduan dipertimbangkan sebagai indikator *fraud* (*red flags*) oleh auditor namun bukan sebagai bukti *fraud*. Hal ini dikarenakan auditor perlu melakukan investigasi lebih lanjut untuk memastikan kebenaran informasi dan pengaduan tersebut.

Pada pemerintahan salah satu sektor yang sering terjadi tindak *fraud* (korupsi) adalah pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Indikator *fraud* (*red flags*) di setiap tahapan proses pengadaan (*procurement*) sebagai berikut (Matthew *et al.*, 2013).

1. Tahap menetapkan kebutuhan barang atau jasa. Beberapa indikator kecurangan (*red flags*) pada tahapan ini seperti:
 - a. Terlalu berlebihan dalam mempertahankan stok untuk membenarkan melakukan pembelian.
 - b. Menjual barang yang masih dalam kondisi baik dan berguna, disaat yang sama melakukan pembelian barang yang sama.
 - c. Terus melakukan pembelian sebagai respon dari kegiatan penjualan yang agresif.
 - d. Anggaran baru dibuat segera setelah muncul permintaan pembelian.

2. Tahap pengembangan spesifikasi barang/jasa yang dibutuhkan. Beberapa indikator *fraud (red flags)* pada tahapan ini seperti:
 - a. Membuat spesifikasi yang hanya sesuai untuk satu kontraktor tunggal.
 - b. Membuat spesifikasi yang hanya cocok untuk satu produk.
 - c. Memberikan informasi penting terkait spesifikasi kepada kontraktor yang disukai.
 - d. Membuat spesifikasi yang rumit sehingga sulit diperbandingkan.
3. Tahap sebelum sosialisasi pengadaan. Beberapa indikator *fraud (red flags)* pada tahapan ini seperti:
 - a. Alasan pembenaran bahwa hanya ada satu penyedia/kontraktor tunggal.
 - b. Personil teknis memberikan informasi terlebih dahulu kepada salah satu calon peserta lelang.
 - c. Pembenaran hanya ada satu penyedia tunggal ditandatangani oleh manajer yang tidak memiliki otoritas.
 - d. Adanya pembatasan-pembatasan yang terdapat dalam dokumen pengadaan untuk mengurangi persaingan/kompetisi dalam lelang.
4. Tahap sosialisasi pengadaan, beberapa indikator *fraud (red flags)* pada tahapan ini seperti:
 - a. Pembatasan pengadaan untuk mencegah pemasok yang memenuhi syarat.
 - b. Membatasi waktu untuk mengikuti lelang, sehingga hanya orang-orang yang mendapatkan 'bocoran' informasi di awal yang mengikuti lelang.

- c. Komunikasi yang terlalu berlebihan antara personil pengadaan dengan calon pemasok sehingga terlihat personil tidak berada dalam posisi netral.
 - d. Melakukan pengaturan harga penawaran pada saat proses lelang.
 - e. Adanya diskusi personil pengadaan dengan pemasok tentang kemungkinan dilakukannya subkontraktor.
 - f. Mengasistensi salah satu pemasok sebagai upaya memenangkannya di proses lelang.
5. Tahap penerimaan penawaran. Beberapa indikator *fraud (red flags)* pada tahapan ini seperti:
- a. Menerima penawaran ketika proses lelang berakhir.
 - b. Pemalsuan dokumen agar tawaran dapat diterima.
 - c. Perubahan harga penawaran setelah harga penawaran pemasok lain diketahui.
 - d. Penawaran dilakukan oleh orang yang sama namun menggunakan perusahaan yang berbeda.
 - e. Penolakan tawaran tanpa alasan yang sah.
 - f. Hilangnya salah satu penawaran.
 - g. Perlakuan istimewa terhadap pemasok tertentu pada proses evaluasi penawaran.
 - h. Melibatkan personil yang bias atau memiliki konflik kepentingan dalam proses evaluasi penawaran.
6. Setelah penandatanganan kontrak. Beberapa indikator *fraud (red flags)* pada tahapan ini seperti:
- a. Menerima barang tanpa melakukan inspeksi atau pengecekan ulang.

- b. Tidak ada tindakan yang diambil terkait ketidakpatuhan pemasok dengan persyaratan dan kondisi barang yang telah ditentukan.
- c. Dokumen kontrak tidak lengkap.
- d. Pergantian barang tertentu dengan barang bekas atau dengan barang yang kualitasnya lebih rendah.
- e. Adanya tagihan untuk barang yang tidak pernah dikirim.

Adapun beberapa kategori indikator menurut (Moyes *et al.*, 2006) untuk mengidentifikasi *red flags* dalam mendeteksi *fraud* yaitu tekanan, peluang, rasionalisasi dan stabilitas keuangan.

2.1.6 Independensi Auditor

Menurut (Johnson, 1996) tugas-tugas umum auditor internal sektor publik meliputi: (1) Salinan audit tentang laporan dari akun yang disampaikan dalam tata cara penulisan yang ditentukan bersama-sama dalam laporan kepada menteri atau sekretaris negara. (2) Para auditor harus menyatakan apakah akun menurut mereka dapat memberikan pandangan yang benar dan adil sesuai dengan urusan operasi. (3) Auditor harus menyatakan apakah akun tersebut telah memberikan semua informasi yang diperlukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. (4) Para auditor biasanya akan melaporkan jika mereka tidak puas dengan aspek dalam laporan keuangan.

Menurut (Pedoman Perilaku Auditor Internal Pemerintah Indonesia, 2018) Independensi adalah mutu, sifat, dan keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh dan melekat pada diri seseorang sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang menunjukkan kewibawaan dan kejujuran. Dengan menegakkan independensi maka pertimbangan profesional

(*professional judgement*) seorang Auditor akan lebih dipercaya keahliannya.

Independensi adalah sikap yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan. Auditor menunjukkan independensi tingkat tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses yang sedang diaudit. Auditor membuat penilaian berimbang dari semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingannya sendiri ataupun orang lain dalam membuat penilaian. Prinsip independensi menentukan kewajiban bagi Auditor untuk berterus terang, jujur secara intelektual dan bebas dari konflik kepentingan.

Dalam menerapkan prinsip independensi, auditor wajib melakukan pekerjaan dengan kejujuran, ketekunan, dan bertanggung jawab. Untuk melaksanakan etika independensi auditor sebaiknya bersikap dan bertindak transparan selalu tanggap terhadap kepentingan bangsa dan negara, melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, menggunakan daya dan upaya yang maksimal agar tidak terjadi kesalahan yang dapat menyebabkan kerugian negara dan berupaya menyelesaikan tugas sebaik-baiknya dalam waktu yang tersedia sehingga hasil kerja dapat dimanfaatkan secara optimal, menaati hukum dan membuat pengungkapan yang diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan dan profesi.

Auditor juga dalam mempertahankan independensinya sebaiknya tidak menerima gratifikasi terkait dengan jabatan dalam bentuk apapun. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan,

perjalanan wisata, pengobatan, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Sehingga auditor wajib menolak gratifikasi berupa pemberian uang atau yang disetarakan, hadiah atau pemberian dengan bentuk dan nilai tertentu, dimana diketahui atau patut diduga pemberian tersebut diberikan dalam kaitannya dengan pekerjaan atau jabatan auditor yang bersangkutan. Apabila gratifikasi tidak bisa dihindari, auditor wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Auditor sebaiknya juga tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya, atau yang dapat menimbulkan prasangka, atau yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya secara objektif. Tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu atau patut diduga mengganggu pertimbangan profesionalnya. Mengungkapkan semua fakta material yang diketahui, yaitu fakta yang jika tidak diungkapkan dapat mengubah atau mempengaruhi pengambilan keputusan atau menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum.

Dalam setiap menjalankan pekerjaannya seorang auditor dituntut untuk selalu bersikap independen dari pihak manapun. (Hartan *et al.*, 2016) mengemukakan bahwa sebagai seorang auditor independensi merupakan suatu sikap yang harus dimiliki, yang artinya sikap untuk tidak memihak dalam melakukan tugas audit. Para pengguna laporan keuangan percaya bahwa dalam melakukan tugasnya, auditor akan bersikap independen. Sikap

independensi merupakan dasar utama kepercayaan para pemakai laporan keuangan terhadap profesi auditor, di mana kejujuran seorang auditor sangat diharapkan untuk mempertimbangkan fakta dan kebenaran di dalam merumuskan dan menyatakan pendapat sebuah laporan keuangan dan salah satu faktor yang penting untuk menilai mutu jasa kualitas pekerjaan seorang auditor.

The Institute of Internal Auditors IIA (2011:43) sebagai ikatan internal auditor di Amerika yang dibentuk pada tahun 1941 merumuskan definisi independensi sebagai berikut:

“Independence is the freedom from conditions that threaten the ability of the internal audit activity to carry out internal audit responsibilities in an unbiased manner. To achieve the degree of independence necessary to effectively carry out the responsibilities of the internal audit activity, the chief audit executive has direct and unrestricted access to senior management and the board. This can be achieved through a dual-reporting relationship. Threats to independence must be managed at the individual auditor, engagement, functional, and organizational levels”.

Independensi adalah sikap yang diharapkan dari seorang auditor untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam pelaksanaan tugasnya. Jika seorang auditor internal tidak dapat bersikap independen, maka akan sulit dalam upaya mencegah dan mendeteksi adanya *fraud* disuatu instansi pemerintahan dan ini akan mengakibatkan gagalnya mewujudkan pemerintahan yang bersih dari upaya mencegah adanya pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu, profesi auditor internal akan sangat sensitif terhadap masalah independensi.

Independensi merupakan standar umum *auditing* yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang menyatakan bahwa dalam semua yang berhubungan dengan perikatan, independensi dan sikap mental harus

dipertahankan oleh auditor. Independensi secara esensial merupakan sikap pikiran seseorang yang memiliki tanggung jawab, bebas dalam mengkomunikasikan hasil pemeriksaannya dan menghindari konflik kepentingan.

(Mautz dan Sharaf dalam Tuanakotta, 2011:64-65) menekankan tiga dimensi dari independensi sebagai berikut:

1. *Programming Independence.*

Programming independence adalah kebebasan (bebas dari pengendalian atau pengaruh orang lain, misalnya dalam bentuk pembatasan) untuk memilih teknik dan prosedur audit, dan berapa dalamnya teknik dan prosedur audit.

2. *Investigative Independence.*

Investigative independence adalah kebebasan (bebas dari pengendalian atau pengaruh orang lain, misalnya dalam bentuk pembatasan) untuk memilih area, kegiatan, hubungan pribadi, dan kebijakan manajerial yang akan diperiksa. Ini berarti, tidak boleh ada sumber informasi yang *legitimate* (sah) yang tertutup bagi auditor.

3. *Reporting Independence.*

Reporting independence adalah kebebasan (bebas dari pengendalian atau pengaruh orang lain, misalnya dalam bentuk pembatasan) untuk menyajikan fakta yang terungkap dari pemeriksaan atau pemberian rekomendasi atau opini sebagai hasil pemeriksaan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 pasal 56 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menyebutkan bahwa aparat pengawasan intern pemerintah dalam melaksanakan tugasnya

harus independen dan obyektif. Sedangkan menurut standar audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PERMENPAN) No. PER/05/M.PAN/03/2008 yang mengatur independensi dan objektivitas disebutkan bahwa dalam semua hal yang berkaitan dengan audit, APIP harus independen dan para auditornya harus obyektif dalam pelaksanaan tugasnya. Posisi APIP ditempatkan secara tepat sehingga bebas dari intervensi, dan memperoleh dukungan yang memadai dari pimpinan tertinggi organisasi sehingga dapat bekerjasama dengan auditee dan melaksanakan pekerjaan dengan leluasa. Meskipun demikian, APIP harus membina hubungan kerja yang baik dengan *auditee* terutama dalam saling memahami diantara peranan masing-masing lembaga.

Menurut (IAI, 2001: 220.1) untuk mengetahui independensi seorang auditor dapat dilihat dari beberapa indikator berikut ini.

1. *Independence in fact* (independensi dalam fakta).

Auditor harus memiliki sikap kejujuran yang tinggi dalam setiap proses audit yang dilaksanakan dan dalam mempertimbangkan berbagai fakta yang ditemui dalam auditnya.

2. *Independence in appearance* (independensi dalam penampilan).

Independensi dalam penampilan merupakan pandangan dari pihak lain terhadap diri auditor yang berkaitan dengan pelaksanaan audit, serta auditor harus menjaga kedudukannya sehingga pihak lain akan mempercayai sikap independensinya.

3. *Independence in competence* (independensi dari sudut keahlian).

Independensi dari sudut keahlian berhubungan dengan kompetensi atau kemampuan auditor dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas auditnya.

2.1.7 Moral Reasoning

Menurut (Gaffikin dan Lindawati, 2012) *moral reasoning* didefinisikan sebagai alasan yang mendasari seseorang dalam melakukan suatu tindakan atau alasan yang mendasari seseorang dalam membenarkan ataupun mengkritik suatu perbuatan. Dalam hal ini alasan moral diperoleh dari proses pembelajaran dan penalaran ilmiah yang dilakukan seseorang (auditor). Bentuk-bentuk alasan moral terlihat dari perilaku yang diperlihatkan didalam bekerja seperti jujur dan bekerja sesuai dengan hati nurani dan sumpah jabatan. Ketika pertimbangan moral telah dilaksanakan dengan baik dalam membuat setiap keputusan, maka mutu pekerjaan yang dilaksanakan akan semakin membaik.

(Velasquez *et al*, 2012: 78) menjelaskan bahwa seseorang yang memiliki perkembangan moral yang baik mampu melihat sesuatu dalam sudut pandang yang luas dan mampu mengambil keputusan secara rasional. Sementara (Moreney dalam Fitriana, 2019) mengemukakan bahwa semakin tinggi level moral individu maka akan semakin sensitif individu tersebut terhadap isu-isu etika. Ketika auditor menghadapi dilema audit, auditor yang memiliki penalaran moral lebih tinggi cenderung berperilaku sesuai dengan standar profesi. *Moral reasoning* merupakan karakteristik yang berasal dari dalam individu. Seseorang dengan *moral reasoning* yang tinggi akan memberikan penilaian dan pertimbangan tentang apa yang harus dilakukan

dalam situasi berkonflik lebih baik. Ketika auditor menghadapi dilema audit, auditor akan berhati-hati dalam memastikan bahwa keputusan audit telah didasarkan oleh bukti yang memadai.

Menurut (Goleman, 1996) untuk menjadi seorang auditor yang mampu melaksanakan tanggungjawabnya dengan menjunjung tinggi etika profesinya, kecerdasan intelektual hanya menyumbang 20%, sedangkan 80% dipengaruhi oleh bentuk-bentuk kecerdasan yang lain salah satunya adalah kecerdasan emosional. Dalam penjelasan tersebut *moral reasoning* mengacu pada dua hal, di mana *moral reasoning* memutuskan mana yang benar dan salah dengan menggunakan intelektual manusia dan emosional manusia.

Dalam teori perkembangan moral kognitif (Kohlberg, 1969), pertimbangan moral/alasan moral dapat dinilai dengan menggunakan tiga kerangka level yang terdiri dari:

1. *Pre-conventional level.*

Dalam tahap ini, individu membuat keputusan untuk menghindari risiko atau kepentingan pribadi (fokus pada orientasi jangka pendek). Individu pada level moral ini akan memandang kepentingan pribadinya sebagai hal yang utama dalam melakukan suatu tindakan. Selain itu, individu akan melakukan suatu tindakan karena takut terhadap hukum/peraturan yang ada.

2. *Conventional level.*

Dalam tahap ini, individu menjadi lebih fokus pada dampak dari tindakan yang mereka lakukan. Dalam situasi dilema etika, fokus individu bergeser dari fokus jangka pendek dan berorientasi kepentingan pribadi

menjadi berorientasi pada pertimbangan akan kebutuhan untuk mengikuti aturan umum untuk menciptakan perilaku yang baik. Individu akan mendasarkan tindakannya pada persetujuan teman-teman atau keluarganya dan juga pada norma-norma yang ada di masyarakat. Individu akan memandang dirinya sebagai bagian integral dari kelompok referensi. Mereka cenderung melakukan *fraud* demi menjaga nama baik kelompoknya.

3. *The post conventional level.*

Dalam level ini, individu fokus pada prinsip etika secara luas sebagai panduan perilaku mereka. Selain itu, individu mendasari tindakannya dengan memperhatikan kepentingan orang lain dan berdasarkan tindakannya pada hukum-hukum universal.

Menurut (Cohen *et al.*, 1996) *moral reasoning* sebagai kesadaran moral yang menjadi faktor utama yang mempengaruhi perilaku moral dalam pengambilan keputusan etis. Untuk mendapatkan keputusan etis dapat dilakukan dengan cara menalar sebuah masalah berdasarkan sebuah pengalaman. (Cohen dan Faurey, 1993) mengemukakan bahwa penalaran moral dapat diukur dengan menggunakan *Multidimensional Ethics Scale* (MES). MES secara spesifik mengidentifikasi rasionalisasi dibalik alasan moral dan mengapa responden percaya bahwa suatu tindakan adalah etis. Lima konstruksi moral terefleski dalam MES adalah:

1. *Justice* atau *moral equity*. Konstruk ini menyatakan bahwa melakukan sesuatu yang benar ditentukan oleh adanya prinsip keadilan moral. Dalam konstruk ini dicerminkan tindakan seseorang itu adil atau tidak adil. Wajar atau tidak wajar. Secara moral benar atau tidak benar.

2. *Relativism*. Kontruk ini merupakan model penalaran pragmatis yang beranggapan bahwa etika dan nilai-nilai bersifat umum namun terkait pada budaya. Dalam konstruk ini dicerminkan tindakan seseorang itu secara kultural dapat diterima atau tidak dapat diterima dan secara tradisional dapat diterima atau tidak.
3. *Egoism*. Konstruk ini menyatakan bahwa individu selalu berusaha untuk memaksimalkan kesejahteraan individu dan memandang sebuah tindakan adalah etis jika memberikan keuntungan diri sendiri. Dalam konstruk ini dicerminkan tindakan seseorang menunjukkan memuaskan atau tidak memuaskan diri sendiri.
4. *Utilitarianism*. Konstruk menyatakan bahwa penalaran moral adalah salah satu dari filosofi konsekuensi. Moralitas dari suatu tindakan merupakan sebuah fungsi dari manfaat yang diperoleh dan biaya yang terjadi. Konsekuensinya adalah bagaimana memaksimalkan biaya dan meminimalkan biayanya. Dalam konstruk ini dicerminkan tindakan tertentu dari seseorang apakah menghasilkan manfaat yang besar atau kecil dan tindakan tersebut meminimalkan keuntungan.
5. *Deontology atau contractual*. Kontruk ini merupakan cara penalaran dengan menggunakan logika untuk mengidentifikasi tugas atau tanggung jawab yang akan dilakukan. Aturan yang berlaku terkait profesi auditor merupakan salah satu contoh pedoman untuk melaksanakan tugas. Dalam konstruk ini dicerminkan tindakan seseorang tersebut melanggar atau tidak melanggar janji yang terucap.

2.1.8 Kemampuan Auditor Mendeteksi *Fraud*

Kemampuan auditor merupakan keahlian dan kemahiran yang dimiliki untuk menjalankan tugas-tugasnya, termasuk dalam pengumpulan bukti-bukti, membuat *judgment*, mengevaluasi pengendalian intern, serta menilai risiko audit. Seorang auditor sangat dituntut akan kemampuannya dalam memberikan jasa yang terbaik sesuai dengan kebutuhan perusahaan ataupun organisasi.

Kemampuan auditor menunjukkan tingkat pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki auditor. Bisa dikatakan semakin auditor berpengalaman maka akan semakin berkompeten. Pengalaman yang dimaksud disini adalah lama dan banyaknya penugasan audit yang pernah dilakukan dan pemeriksaan laporan keuangan. Pengetahuan auditor adalah pengetahuan mengenai isu-isu akuntansi terbaru, pengauditan umum, dan penyelesaian kasus-kasus atau masalah.

Deteksi *fraud* mengacu pada proses menemukan bukti *fraud* yang dapat dicapai melalui rancangan internal kontrol yang baik, pengawasan, pemantauan dan aktif mencari bukti kecurangan (Kranacher *et al.*, 2011:33). Sedangkan (Anggriawan, 2014) mendeteksi *fraud* adalah upaya untuk mendapatkan indikasi awal yang cukup mengenai tindak *fraud*, sekaligus mempersempit ruang gerak para pelaku *fraud* dan juga dalam pendeteksian *fraud*, sebagian besar bukti-bukti *fraud* merupakan bukti-bukti yang sifatnya tidak langsung. Petunjuk adanya *fraud* biasanya ditunjukkan oleh munculnya gejala-gejala (*symptoms*) seperti adanya dokumentasi yang mencurigakan, keluhan dari pegawai ataupun kecurigaan dari teman sekerja. Pada awalnya

fraud akan tercermin melalui timbulnya karakteristik tertentu, baik yang merupakan kondisi atau keadaan lingkungan maupun perilaku seseorang.

Kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud* adalah kualitas dari seorang auditor dalam menjelaskan kekurangwajaran laporan keuangan yang disajikan perusahaan dengan mengidentifikasi dan membuktikan *fraud* tersebut (Nasution dan Fitriany, 2012). Menurut (Tuanakotta, 2013:351) kemampuan auditor dalam pendeteksian *fraud* berkaitan dengan teknik-teknik yang dikuasai auditor sebagai bekal dalam menjalankan tugasnya. Teknik yang dimaksud dapat berupa teknik dalam mengaudit laporan keuangan, kemampuan audit investigatif untuk kejahatan terorganisir dan penyelundupan pajak penghasilan, kemampuan audit investigatif dalam pengungkapan kecurangan pengadaan barang dan jasa.

Salah satu tugas auditor terhadap perusahaan, organisasi atau instansi yang di audit adalah melihat adanya tindak *fraud*. Mulanya auditor dapat melakukan dengan memberikan peringatan dini terhadap potensi terjadinya *fraud* serta rekomendasi perbaikan terhadap kelemahan sistem pengendalian intern. Rekomendasi tersebut dapat berupa perbaikan kebijakan dan prosedur untuk mencegah dan mendeteksi *fraud* lebih awal, sehingga dampak atau risiko *fraud* dapat diminimalisir.

Menurut (Fullerton dan Cindy, 2004) ada beberapa indikator kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud* yaitu kecurangan budaya yang tinggi di perusahaan (*high fraud corporate cultures*), hubungan yang dipertanyakan dengan pihak luar (*questionable relations with outside parties*), peluang penipuan (*fraud opportunities*), gejala pribadi (*personal symptoms*), rasionalisasi pribadi (*personal rationalizations*), indikator demografis

(*demographic indicators*), praktik akuntansi (*accounting practice indicators*), laporan keuangan (*financial statement indicators*), dan situasi penipuan netral (*neutral fraud situation*).

2.2 Tinjauan Empiris

Penelitian empiris mengenai *red flags*, independensi, *moral reasoning* dan kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud* yang menjadi acuan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut.

Arsendy (2017) meneliti tentang pengaruh pengalaman audit, skeptisme profesional, *red flags*, dan tekanan anggaran waktu terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Penelitian ini dilakukan di Kantor Akuntan Publik DKI Jakarta. Hasil menunjukkan bahwa *red flags* berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*.

Prasetyo (2015) meneliti pengaruh *red flags*, skeptisme profesional auditor, kompetensi, independensi, dan profesionalisme terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Penelitian ini dilakukan di Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru, Padang, dan Medan. Hasil menunjukkan bahwa *red flags* berpengaruh signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan tetapi independensi tidak berpengaruh.

Pratama *et al.*, (2019) meneliti pengaruh *red flags* dan *whistleblowing system* terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Penelitian ini ialah studi empiris pada BUMN di Kota Bandung. Hasil menunjukkan bahwa *red flags* berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Badzlina W. *et al.* (2018) meneliti pengaruh *red flags* dan *whistleblowing system* terhadap pendeteksian kecurangan penyalahgunaan aset. Penelitian ini dilakukan di PT. Kimia Farma Tbk. Bandung. Hasil menunjukkan bahwa *red flags* berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian kecurangan penyalahgunaan aset.

Indrawati *et al.* (2019) meneliti pengaruh skeptisisme profesional, independensi auditor dan pelatihan audit kecurangan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Penelitian ini dilakukan di kantor akuntan publik. Hasil menunjukkan bahwa independensi mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Hutabarat (2015) meneliti pengaruh profesionalisme, independensi, kompetensi dan tanggungjawab auditor terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Penelitian ini dilakukan di kantor akuntan publik wilayah Sumatera. Hasil menunjukkan bahwa independensi berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi fraud.

Hartan dan Indarto (2016) meneliti pengaruh skeptisme profesional, independensi dan kompetensi terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. Penelitian ini dilakukan di Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil menunjukkan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Larasati dan Windhy (2019) meneliti pengaruh pengalaman, independensi, skeptisisme profesional auditor, penerapan etika, dan beban kerja terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Penelitian dilakukan di kantor akuntan publik wilayah Jabodetabek. Hasil menunjukkan

bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Mindarti *et al.* (2016) meneliti tentang *moral reasoning* memoderasi kompetensi dan independensi terhadap audit. Penelitian ini dilakukan di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil menunjukkan bahwa *moral reasoning* memperkuat pengaruh independensi terhadap kualitas audit.

Vindy (2018) meneliti pengaruh *moral reasoning*, pengalaman dan tipe kepribadian terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Penelitian dilakukan di Kantor Inspektorat. Hasil menunjukkan bahwa *moral reasoning* tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*.

Dewi dan Dwiranra (2018) meneliti peran *moral reasoning* dan skeptisisme profesional memoderasi *role stress* terhadap perilaku disfungsional internal auditor. Penelitian ini dilakukan di PT. Bank BRI wilayah Bali. Hasil menunjukkan bahwa *moral reasonong* memiliki peran dalam perilaku disfungsional auditor dan *moral reasoning* juga memperkuat pengaruh *role stress* terhadap perilaku disfungsional auditor.

Fitriana (2019) meneliti faktor internal auditor yang mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Penelitian ini dilakukan di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil menunjukkan bahwa *moral reasoning* tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan.